



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI DPRD TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR TAHUN
2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua DPRD Nomor 367/-073.61 tentang Hasil Pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang disebutkan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini agar memberikan jawaban berupa penjelasan (kolom 6) dan rencana tindak lanjut (kolom 7) terhadap naskah yang bersifat rekomendasi (kolom 2) tersebut sebagaimana terlampir dan dapat diunduh melalui http://bit.ly/TL_LKPJ2019.

KEDUA : Pelaksanaan pengisian Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta (softcopy dapat dikirim ke lkpj@bapedadki.net) paling lambat hari Jumat 19 Juni 2020.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 36 TAHUN 2020
Tanggal 29 Mei 2020

Naskah Rekomendasi		Sifat	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Penjelasan SKPD	Tindak Lanjut SKPD
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
HASIL PEMBAHASAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA Terhadap LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019							
1. BIDANG PEMERINTAHAN							
1	Selain pencapaian realisasi anggaran, hal lain yang sama pentingnya adalah melihat output dari sebuah program atau kegiatan, di mana tolak ukurnya adalah tercapainya target indikator program/kegiatan. Oleh karena itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta agar target indikator program/kegiatan untuk seluruh OPD/UPPT dapat dilakukan review secara menyeluruh dan dilakukan penyempurnaan sehingga sasaran kinerja dapat lebih realistis, dapat diukur dan spesifik. Jika memang diperlukan dapat melibatkan Lembaga konsultan profesional. Selain itu, target kinerja yang ditetapkan harus lebih memberikan tantangan kepada OPD/UPPT untuk mencapai kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 4-5	1 Bidang Pemerintahan	1 Bappeda		
2	DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan agar dilakukannya survei rutin mengenai kepuasan warga terhadap kinerja pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh lembaga survei yang kredibel, sehingga ada ukuran yang jelas bagi kualitas layanan publik di Provinsi DKI Jakarta.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 5	1 Bidang Pemerintahan 2 Bidang Perencanaan	1 DPMP/TSP		
3	DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan untuk dilakukan kajian mengenai pembentukan struktur BPBD di tingkat kota, mengingat jumlah personil BPBD yang sangat terbatas untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di wilayah Provinsi DKI Jakarta.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 5	1 Bidang Pemerintahan	1 BPBD		
4	DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan agar sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP dalam pengawasan dan pemberian reklame dapat dilengkapi.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 5	1 Bidang Pemerintahan	1 Satpol PP		
5	DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta agar dilakukan sinkronisasi dan update berkala terhadap data kependudukan baik bagi pemegang KTP DKI Jakarta maupun pendatang yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, khususnya data penduduk miskin dan rentan antar OPD/UPPT di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga terdapat sebuah data yang valid dan akurat. Tidak adanya basis data yang akurat selama ini, terlihat pada saat pembagian bantuan sosial akibat penerapan PSBB yang lalu, di mana sebanyak 1.194.633 Kepala Keluarga penerima Bantuan Sosial sesuai Keputusan Gubernur Nomor 386 Tahun 2020 ternyata masih terjadi kesalahan sasaran penerima bantuan dan warga pendatang yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat sebagai penerima bantuan sosial.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 5-6	1 Bidang Pemerintahan 2 Bidang Kesra	1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Dinas Sosial		
6	Pengurus RT/RW dapat dilibatkan dalam pendataan penduduk miskin dan rentan dan diberikan dukungan anggaran yang lebih baik sehingga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan dana operasional RT/RW	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 6	1 Bidang Pemerintahan			
7	Terkait dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 100 Tahun 2019 tentang Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2019, DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta agar ke depan, pihak eksekutif tidak ada lagi mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat bertentangan atau mengangur peraturan yang lebih tinggi.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 6	1 Bidang Pemerintahan 2 Bidang PPT	1 Bappeda		

Naskah Rekomendasi		Sifat	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Penjelasan SKPD	Tindak Lanjut SKPD
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan terjadinya pandemi COVID-19, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap asumsi, rencana, sasaran pembangunan dan pencapaian target dari RPJMD 2018 - 2022. DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan kepada pihak eksekutif untuk segera mengajukan Revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD 2018 - 2022.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 6	1 Bidang Pemerintahan 2 Bidang PSPP	1 Bappeda		
9	DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta agar Badan Perencana Pembangunan Daerah dan seluruh OPD/UPD lebih cermat dalam melakukan penyisiran anggaran sehingga duplikasi anggaran seperti yang terjadi pada Dinas dan Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil tidak terjadi lagi.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 6	1 Bidang Pemerintahan	1 Bappeda		
10	Terkait dengan Pergub Nomor 90 tahun 2018 tentang Peningkatan Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu, di mana ditetapkan 445 RW Kumuh, DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta agar setiap tahun jumlah RW Kumuh dapat berkurang secara dratis.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 7	1 Bidang Pemerintahan 2 Bidang SPKLH	1 Bappeda 2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
11	Terdapat Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah yang menempati lahan sengkedat dan secara hukum di pengadalan telah dimenangkan oleh masyarakat sebagai pengugat agar dapat diserahkan dan dihapus dalam daftar aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 7	1 Bidang Pemerintahan 2 Bidang Perkonomian	1 Bappeda 2 BRAD		
12	Terkait dengan Bantuan Keuangan Partai Politik perlu untuk dilakukan kajian agar Partai Politik lebih fleksibel untuk memanfaatkan dana tersebut dalam membayai berbagai kegiatan partai politik.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 7	1 Bidang Pemerintahan			
13	DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta dilakukan evaluasi terhadap peran dan fungsi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 7	1 Bidang Pemerintahan 2 Bidang Kesra	1 Bakesbangpol 2 Biro Pendidikan dan Mental Spiritual		
14	DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan dilakukan evaluasi menyeluruh terkait Tupoksi dan kewenangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 7	1 Bidang Pemerintahan			
15	DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta agar penyerahan fasos dan fasmus sebagai kewajiban Pengembang Pemegang SIPTT dapat diselesaikan sehingga akan dapat memperbaiki kinerja laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 7	1 Bidang Pemerintahan 2 Bidang SPKLH			
16	DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta agar usulan aspirasi masyarakat yang berasal dari kegiatan Musrenbang dan Reses anggota DPRD DKI Jakarta diberikan porsi anggaran tertentu sehingga dapat direalisasikan di dalam APBD Provinsi DKI Jakarta.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 8	1 Bidang Pemerintahan 2 Bidang PPT			
17	DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta agar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui kegiatan reses DPRD dapat mendapatkan perhatian serius dari pihak eksekutif karena diberikan hak untuk menjang aspirasi warga, sudah seharusnya aspirasi warga tersebut direalisasikan. Selain itu, Sistem E-Reses seharusnya dapat terhubung dengan sistem perencanaan pembangunan BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 8	1 Bidang Pemerintahan 2 Bidang PPT 3 UP Pustadit/renbang			
18	Terkait dengan penanganan kebakaran di Permukiman padat penduduk dan permukiman kumuh, selama ini ada beberapa kendala yang dihadapi yakni belum adanya regulasi bagi pemberian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kepada warga masyarakat; belum terukupinya personil dan sarana prasarana bagi beroperasinya hidran mandiri dan minimnya jumlah pos pemadam di lingkar kelurahan. DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta agar pihak eksekutif dapat segera mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 8	1 Bidang Pemerintahan	1 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		
19	Terdapat rekrutmen PJP agar diperhatikan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan harus dihindari menerima orang titipan dari oknum pejabat tertentu.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 8	1 Bidang Pemerintahan			
II. BIDANG PEREKONOMIAN							
1	Secara umum BUMD menjalankan kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai misi pelayanan dan mendapatkan profit serta keberadaan BUMD dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 9	1 Bidang Perekonomian	1 BP BUMD		
2	Pendapatan Asli Daerah dari Dividen BUMD Provinsi DKI Jakarta menunjukkan ada peningkatan sekitar 4,5% dari 592,96 M pada tahun 2018 menjadi 619,46 M pada tahun 2019.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 9	1 Bidang Perekonomian	1 BP BUMD 2 BPKD 3 BPRD		

Naskah Rekomendasi		Sifat	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Penjelasan SKPD	Tindak Lanjut SKPD
3	SKPD mitra DPRD Provinsi DKI Jakarta harus menempatkan orang-orang ahli dalam pelaksanaan kegiatan anggaran dan harus ada koordinasi dan sinergi yang baik dengan SKPD lain	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 9	1 Bidang Perencanaan			
4	Setiap SKPD harus membuat kegiatan prioritas dan relevan untuk kebutuhan masyarakat Jakarta dan tidak membuat program-program seremonial, agar kegiatan-kegiatan terukur manfaatnya dan tidak mubazir.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 9	1 Bidang Perencanaan			
5	Laporan Dinas UMKM menuliskan pencapaian program pembinaan kewirausahaan dan pengembangan UKM belum maksimal karena realisasi pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang baru mencapai 54,67 persen dari target. Oleh karena itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan agar Dinas UMKM melaksakan percepatan partisipasi pelaku UKM ke dalam program kewirausahaan terpadu dengan berbagai skema insentif, mulai dari pelatihan yang intensif, pendampingan, hingga akses permodalan.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 9-10	1 Bidang Perencanaan	1 Dinas Koperasi, UMKM		
6	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu merancang diversifikasi target wisatawan mancanegara ke Jakarta untuk menaikkan jumlah kunjungan wisatawan. Dan melakukan perbaikan sarana dan prasarana destinasi pariwisata di Jakarta. Selain itu, Dinas Parakerat harus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat, komunitas dan pelaku industri pariwisata. Juga, melakukan peningkatan publikasi dan informasi obyek wisata beserta atraksinya.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 10	1 Bidang Perencanaan	1 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
7	DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) bidang perekonomian dapat mengoptimalkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun anggaran 2020 terlebih pada masa pandemi saat ini. Mekanisme yang baik dalam proses lelang sebaiknya segera direncanakan, agar kedepan lelang yang memakan waktu tidak mengganggu penyerapan APBD. Harga-harga yang tidak sesuai dengan pagu yang ada mohon disesuaikan. Dalam melakukan perencanaan, SKPD harus berhati-hati dan terperinci sehingga anggaran yang ada tidak sia-sia, dan pembangunan untuk warga Jakarta dapat dirasakan sepenuhnya karena salah satu penyebab belum optimalnya persentase penyerapan anggaran adalah karena beberapa kegiatan yang gagal lelang. Terkait masalah gagal lelang harus menjadi perhatian, karena ini sudah berulang kali dan harus diantisipasi. Meskipun tidak terlalu besar, tetapi jika gagal lelang akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 10	1 Bidang Perencanaan			
8	DPRD Provinsi DKI Jakarta mengharuskan agar setiap BUMD melaporkan audit finansial dan audit kinerja dari masing-masing BUMD. Dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki tugas memberikan pelayanan masyarakat agar lebih ditingkatkan, karena dengan pelayanan yang baik akan berdampak kepada meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 11	1 Bidang Perencanaan	1 BP BUMD		
9	DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap Pertumbuhan Ekonomi yang pada tahun 2019 mengalami penurunan, dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 11	1 Bidang Perencanaan			
10	Pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19 yang terjadi, dipastikan bahwa sektor ekonomi akan mengalami perlambatan, dan jutaan warga yang berpotensi kembali jatuh miskin. Sehingga diharapkan, Pemprov DKI Jakarta dapat berfokus pada sektor industri ekonomi yang tidak terdampak, serta fokus dalam perbaikan ekonomi melalui stabilisasi harga pasar, bantuan sosial kepada warga terdampak, serta pelatihan pendidikan non formal UMKM.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 11	1 Bidang Perencanaan			
III. BIDANG KEUANGAN							
1	Terkait dengan Pajak Air Bawah Tanah, DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup agar :	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 11-12	1 Bidang Perencanaan 2 Bidang SPKHL	1 Bapenda 2 Dinas Lingkungan Hidup		
a	Memperintahkan untuk menaikkan Tarif Pajak Air Bawah Tanah guna membatasi pengambilan air bawah tanah secara berlebih oleh para pemilik bangunan gedung bertingkat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari atau mencegah terjadinya kerusakan lingkungan berupa penurunan permukaan tanah yang akan berdampak buruk bagi masa depan masyarakat.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 11-12	1 Bidang Perencanaan 2 Bidang SPKHL	1 Bapenda 2 Dinas Lingkungan Hidup		

Naskah Rekomendasi		Sifat	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Penjelasan SKPD	Tindak Lanjut SKPD
b	Melakukan pengawasan dan pemeriksaan fisik terhadap keberadaan Meteran Pompa Air yang terpasang di area bangunan gedung bertingkat, untuk memastikan tidak ada kecurangan (fraud) dalam pengambalian air bawah tanah dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelakunya jika terjadi pelanggaran hukum di lapangan.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 11-12	1 Bidang Perencanaan 2 Bidang SPKLH	1 Bapenda 2 Dinas Lingkungan Hidup		
	c Dan jika terjadi kerusakan meteran air agar Dinas Lingkungan Hidup meminta kepada pemilik bangunan gedung supaya menggantinya dengan meteran air yang baru, atau menyegel dan menutupnya jika sudah tidak dipergunakan lagi.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 11-12	1 Bidang Perencanaan 2 Bidang SPKLH	1 Bapenda 2 Dinas Lingkungan Hidup		
	2 Terkait dengan keterlambatan pemberlakuan tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah agar setiap perubahan peraturan tarif BBN-KB hendaknya dirancang dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga dapat diberlakukan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Selain itu setiap perubahan peraturan mengenai tarif BBN-KB termasuk tarif balik nama KBm bekas (BBN-II) perlu terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga peraturan tersebut bisa diterapkan dengan lebih efektif.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 12	1 Bidang Perencanaan	1 Bapenda		
3 Terkait dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah agar melaksanakan pemeriksaan terhadap penyedia bahan bakar, melakukan pemutakhiran data stasiun pengisian Bahan Bakar Gas (BBG) dan mengadakan monitoring penguasaan tarif PBB-KB sebesar 5% dari yang sebelumnya 0,86% untuk sektor industri.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 13	1 Bidang Perencanaan	1 Bapenda			
4 Terkait dengan target Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang hanya terealisasi Rp 5,478 Tilyun atau 50,51% dari target Rp 9,500 Tilyun DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah agar : a Melakukan penetapan pembayaran BPHTB atas objek PPJB dengan melakukan sosialisasi ke Pengembang Apartemen untuk apartemen yang baru dibangun sesuai dengan Pasal 2 Pergub No. 117 Tahun 2019 bahwa setiap orang atau badan yang melakukan PPJB yang dimaksudkan untuk memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan memasukan BPHTB sebagai komponen pada naga transaksi, wajib menyetorkan BPHTB kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. b Melakukan optimalisasi dan penyempurnaan Sistem E-BPHTB. c Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait pelaporan harga transaksi dengan nilai yang sebenarnya.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 13	1 Bidang Perencanaan	1 Bapenda			
5	Terkait dengan penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu yang hanya terealisasi Rp 276,836 Miliar atau 65,64% dari target Rp 421,750 Miliar DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah agar : a Membangun dan mengembangkan aplikasi system pemungutan retribusi daerah secara elektronik. b Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau Wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). c Membuat perjanjian bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Perbankan dalam rangka pembayaran Retribusi Daerah.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 13	1 Bidang Perencanaan	1 Bapenda		
	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 13	1 Bidang Perencanaan	1 Bapenda			
	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 14	1 Bidang Perencanaan	1 Bapenda			
6	Terkait dengan penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang belum sesuai harapan, DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah agar melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data aset/barang milik Daerah khususnya tanah dan/atau bangunan termasuk fasos fasum baik yang sudah dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga maupun yang belum dimanfaatkan. Kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah dengan Pihak Ketiga diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 14	1 Bidang Perencanaan	1 Bapenda		
	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 14	1 Bidang Perencanaan	1 Bapenda			
	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 14	1 Bidang Perencanaan	1 Bapenda			

Naskah Rekomendasi		Sifat	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Penjelas SKPD	Tindak Lanjut SKPD
7	Selanjutnya DPRD Provinsi DKI Jakarta selaku mitra kerja Pemerintah Daerah ingin mendorong percepatan revisi Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai dasar pengenaan pajak Daerah.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 14-15	1 Bidang Perekonomian	1 Bapenda		
IV. BIDANG PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH							
1	Pemda harus segera memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebanyak 20% sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 15	1 Bidang SPKLH			
2	Penanganan/mengurangi masalah banjir dengan melakukan normalisasi kali, membuat waduk, embung, saluran air yg memadai, rumah pompa yang sesuai dengan kebutuhan, penyediaan pompa mobil yg berkapasitas besar minimal 1000 per detik, membuat sumur resapan sesuai kebutuhan terutama daerah yang jauh dari aliran kali, membuat tanggul untuk menghindari ROB di wilayah Jakarta Utara.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 15	1 Bidang SPKLH	1 Dinas Sumber Daya Air		
3	Pemda harus segera menyelesaikan masalah sampah yang memang sudah sangat mendesak, dalam RPJMD akan dibuatnya ITF di 4 wilayah tetapi sampai sekarang satu pun belum ada yg berjalan, maka dari itu agar Sdr. Gubernur segera mencabut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Lanjutan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Properti dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Dalam Kotariftermidiate Treatment Facility, karena PT. Jakarta Propertindo sebagai pelaksana ITF Sunter di anggap sudah gagal dalam melaksanakan peraturan Gubernur tersebut.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 15-16	1 Bidang SPKLH 2 Bidang Perekonomian	1 Dinas Lingkungan Hidup 2 BP BUMD		
4	Dinas Bina Marga, terkait pembuatan trotoar agar di evaluasi karena banyak menimbulkan jalan yang tergenang air di waktu hujan. Usulan kongkritnya agar pembangunan trotoar di barengi dengan pembuatan jaringan utilitas yang memadai. Sdr. Gubernur agar segera menyelesaikan program pembebasan lahan terkait peruntukan pelebaran jalan yang akan menggunakan lahan waraga selengkap.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 16	1 Bidang SPKLH	1 Dinas Bina Marga		
5	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Penataan, agar Sdr. Gubernur segera melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dikarenakan pengawasan pembangunan gedung yang sangat lemah terkait banyaknya gedung yang roboh, bangunan tanpa ijin dan banyaknya oknum yang main di lapangan.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 16	1 Bidang SPKLH	1 Dinas Cipta Karya		
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman agar segera membangun rumah susun buat masyarakat yang tidak memiliki rumah/ masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama di Wilayah Jakarta Selatan. Dinas Perumahan juga wajib menyediakan air bersih di setiap rumah susun yang ada di Provinsi DKI Jakarta.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 16	1 Bidang SPKLH	1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT							
A. URUSAN DINAS PENDIDIKAN							
1	Meminta evaluasi dan perencanaan strategis untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 17	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pendidikan		
2	Mendorong untuk peningkatan fokus pendidikan vokasi melalui lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah tenaga di Suku Dinas Pendidikan agar proses akreditasi dapat dilaksanakan.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 17	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pendidikan		
3	Mendorong peningkatan perhatian yang tinggi untuk menciptakan sekolah yang inklusif, dengan memberikan pelatihan secara masif kepada seluruh guru, merekrut Guru Pendamping Khusus (GPK), serta menjadikan SLB sebagai pusat pelatihan GPK.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 17	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pendidikan		
4	Meminta Dinas Pendidikan untuk bekerja sama dengan berbagai mitra (baik sektor swasta/pemerintah) untuk peningkatan mutu guru di Sekolah.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 17	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pendidikan		
5	Mendorong kajian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab putus sekolah pada siswa SD/MI, dan SMP/MTs, serta peningkatan pemahaman pentingnya sekolah, karena DKI Jakarta harusnya sudah 100%.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 17	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pendidikan		

Naskah Rekomendasi		Sifat	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Penjelasan SKPD	Tindak Lanjut SKPD
6	Meminta penghentian pembangunan fisik di 2020, dan melakukan penyesuaian di 2021	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 17	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pendidikan		
7	Mendorong penebusan ijazah sebakinya dilakukan oleh Dinas Pendidikan, bukan Yayasan.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 17	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pendidikan		
8	Meminta agar kesejahteraan guru agama baik yang berada di PNS DKI, Kemenag dan honorer diperhatikan.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 18	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pendidikan		
9	Mendorong evaluasi mengapa banyak guru agama honorer yang gagal menjadi PNS, dan melakukan upaya agar guru honorer dapat diangkat menjadi PNS.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 18	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pendidikan		
10	Mendorong reformasi anggaran dan strategi Dinas Pendidikan untuk fokus dalam peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik, baik pendidikan akademis, maupun pendidikan informal atau karakter.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 18	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pendidikan		
B URUSAN DINAS PEMUDA DAN OLARAGA							
1	Meminta kepada Dinas Pemuda dan Olahraga agar dapat menambah dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan di tempat fasilitas olahraga yang ada, seperti di GOR maupun di rusunawa yang ada di Provinsi DKI Jakarta.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 18	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pemuda dan Olahraga		
2	Menilai kurangnya manajemen tempat olahraga yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, sehingga seringkali dimonopoli oleh kelompok tertentu, maka dari itu Dinas Pemuda dan Olahraga perlu memperkuat jaringan manajemen dan koordinasi pada fasilitas olahraga yang dimilikinya.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 18	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pemuda dan Olahraga		
3	Meminta perhitungan partisipasi penduduk yang berolahraga sebesar 9 juta tidak mengabaikan jumlah penduduk, sehingga perlu dikoreksi dengan pemantauan dan pengukuran yang lebih baik.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 18	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pemuda dan Olahraga		
4	Mendorong peningkatan masif dan target yang visioner untuk meningkatkan partisipasi olahraga, sebagai tindakan preventif dan promotif kesehatan.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 19	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pemuda dan Olahraga		
5	Meminta agar commitment fee Formula E dikembalikan untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 560 Miliar.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 19	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pemuda dan Olahraga		
6	Evaluasi gaji atlet yang menyebabkan terjadinya perpindahan atlet berbakat dari Jakarta ke daerah lain.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 19	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pemuda dan Olahraga		
7	Lakukan evaluasi yang menyebabkan DKI Jakarta hanya menempati posisi 3 pada PON 2019, serta pembuatan roadmap DKI Jakarta untuk para atletnya	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 19	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pemuda dan Olahraga		
C URUSAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							
1	Menilai perlunya pergerakan dan strategi masif untuk meningkatkan minat baca, sosialisasi perpustakaan.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 19	1 Bidang Kesra	1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	Mendorong pembelian instrumen pengukuran bahwa program perpustakaan keliling yang dilakukan sudah baik atau belum, khususnya di PAUD dan RPTRA.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 19	1 Bidang Kesra	1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
D BIRO PENDIDIKAN MENTAL							
1	Mendorong penguatan koordinasi komunikasi dalam edukasi dan penanganan COVID-19 ini, karena mereka adalah mitra strategis dalam penyampaian edukasi.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 19	1 Bidang Kesra	1 Biro Pendidikan Mental dan Spiritual		
2	Meminta kesejahteraan marbot atau pengurus tempat ibadah diperhatikan, apalagi ditengah kondisi COVID-19	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 20	1 Bidang Kesra	1 Biro Pendidikan Mental dan Spiritual		
E URUSAN DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK							
1	Meminta adanya peningkatan jangkauan fasilitas pelaporan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga jumlah masyarakat yang melapor juga meningkat.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 20	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		

Naskah Rekomendasi		Sifat	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Penjelasan SKPD	Tindak Lanjut SKPD
2	Mendorong mempermudah layanan pengaduan kepada masyarakat, khususnya di tengah kondisi PSBB di 2020.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 20	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		
3	Meminta penyediaan alat KB di tahun 2020 terpenuhi, khususnya saat pandemi dan PSBB berlangsung.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 20	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		
4	Penggunaan teknologi informasi dan koordinasi data untuk pendataan keluarga, sehingga dapat mempermudah pengumpulan, dan analisis.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 20	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		
5	Mendorong sidak aktif, bahkan pembentukan pansus perlindungan anak, karena masih banyak ditemukannya child trafficking di klub malam.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 20	1 Bidang Kesra 2 Bidang Perekonomian	1 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 2 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
6	Menilai perlunya edukasi perlindungan anak dan perempuan sejak dini dengan berkoordinasi dengan dinas Pendidikan.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 20	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		
7	Meminta perencanaan program strategis pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan berfokus pada edukasi dan pembentukan keluarga yang harmonis.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 20	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		
8	Mendorong pembentukan gugus tugas dari PPK PPS untuk mated pembinaan ibu/keluarga dengan belta.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 21	1 Bidang Kesra	1 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		
F BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL							
1	DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta peran Biro Kesos dalam menjembatani kebutuhan dinas teknis dan hubungan koordinasi melalui pembentukan peraturan gubernur, ataupun koordinasi langsung	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 21	1 Bidang Kesra	1 Biro Kesejahteraan Sosial		
2	Berharap agar Biro Kesos lebih strategis dalam melakukan kajian dan penyampaian analisisnya kepada dinas teknis	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 21	1 Bidang Kesra	1 Biro Kesejahteraan Sosial		
E URUSAN DINAS SOSIAL							
1	Meminta evaluasi peningkatan target indikator Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya. Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri, indeks kepuasan pelayanan kantor, indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional, Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Jumlah lembaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Persentase prasarana dan sarana kesejahteraan sosial yang memenuhi standar pelayanan.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 21	1 Bidang Kesra	1 Dinas Sosial		
2	Mendorong dinas sosial dalam pembuatan basis Data terpadu (BDT) agar ada data valid. Hal ini terlihat pada hasil reses dewan masih banyak keluhan masyarakat terkait program Penda DKI Jakarta seperti KJLP, KJL yang tidak tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 21-22	1 Bidang Kesra	1 Dinas Sosial		
3	Mendorong agar penanganan terhadap PMKS jalanan agar lebih komperhensif sehingga PMKS tidak kambuh dan turun ke jalan lagi.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 22	1 Bidang Kesra	1 Dinas Sosial		
4	Melihat pembinaan karang taruna dibawah dinas sosial tidak berjalan lancar karena tidak banyaknya kegiatan yang mengembangkan para generasi muda di DKI Jakarta, untuk itu menyarankan agar pembinaan karang taruna ini dapat dipindahkan ke dinas pemuda dan olahraga.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 22	1 Bidang Kesra	1 Dinas Sosial		

Naskah Rekomendasi		Sifat	Sumber	Bappeda Koordinasi Bidang	SKPD	Penjelasan SKPD	Tindak Lanjut SKPD
5	Menyarankan agar data lansia yang layak dapat untuk lebih diperhatikan lagi oleh dinas sosial dan penyuluhan KLU (Kartu lansia Jakarta) dapat segera direalisasikan kepada masyarakat dalam waktu dekat dan tepat waktu.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 22	1 Bidang Kesra	1 Dinas Sosial		
URUSAN DINAS KESEHATAN							
1	Meminta agar Dinas Kesehatan melakukan tindakan pencegahan penyakit melalui penyuluhan, serta langkah preventif melalui Puskesmas sampai tingkat RW.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 22	1 Bidang Kesra	1 Dinas Kesehatan		
2	Mengingat pentingnya persiapan APD dan alat rapid test untuk persiapan sampai Desember ini.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 22	1 Bidang Kesra	1 Dinas Kesehatan		
3	Mendorong adanya ruang besar untuk keluarga pasien di RSUD Koja agar dapat diimplementasikan di RSUD lain.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 22	1 Bidang Kesra	1 Dinas Kesehatan		
4	Mengharap agar Dinas Kesehatan kedepannya fokus terhadap hal yang bersifat pencegahan dengan membuat program latihan-latihan kesehatan, penyuluhan melalui program penguatan Puskesmas, Posyandu yang mengedukasi rakyat Jakarta	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 22-23	1 Bidang Kesra	1 Dinas Kesehatan		
5	Meminta untuk melakukan evaluasi aksesibilitas kendaraan di RSUD dan Puskesmas. Sebagai contoh di RSUD Johar Baru tidak layak dikarenakan jalan menungku kesana sulit begitu pula lahan cukup kecil.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 23	1 Bidang Kesra	1 Dinas Kesehatan		
6	Adanya Pemotongan TKD di dinas kesehatan sebagai dampak dari COVID-19, mendorong agar tenaga medis dicekualikan, karena mereka sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 23	1 Bidang Kesra	1 Dinas Kesehatan		
7	Mendorong agar insentif COVID-19 tenaga kesehatan cepat dicairkan.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 23	1 Bidang Kesra	1 Dinas Kesehatan		
8	Mendorong Dinas Kesehatan untuk mendapatkan wewenang untuk mengeluarkan jin pengolahan limbah Rumah Sakit/Puskesmas.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 23	1 Bidang Kesra	1 Dinas Kesehatan		
9	Mendorong agar data bed Rumah Sakit dapat dipaparkan secara terbuka dan real-time.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 23	1 Bidang Kesra	1 Dinas Kesehatan		
10	Mendorong agar informasi pasien Orang Tanpa Gejala transparan, sehingga ada tindakan pencegahan bagi tenaga medis.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 23	1 Bidang Kesra	1 Dinas Kesehatan		
11	Mendorong adanya transparansi data pengecekan hasil swab di Labkesda secara transparan untuk publik dan real-time, serta lama proses menjadi 1x24 jam	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 23	1 Bidang Kesra	1 Dinas Kesehatan		
12	Mendorong adanya Sistem Jaminan Kesehatan Daerah seperti di Jogjakarta yang mampu memberikan bantuan non-medis penunjang bagi pasien.	Rekomendasi	Pidato DPRD Hal. 23-24	1 Bidang Kesra	1 Dinas Kesehatan		
<p>Demikian hasil pembahasan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Sdr. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 yang dapat saya sampaikan. Adapun Hasil Pembahasan Komisi-komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan Eksekutif yang tidak kami bacakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan ini sebagaimana terlampir. Sebagai penutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Pihak Eksekutif serta berbagai Pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas kerjasamanya dan kesabarannya dalam mengikuti Rapat Paripurna ini, semoga Allah Subhanahu Wataala Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin</p>							


 Ditetapkan di: Jakarta
 Pada tanggal: 29 Mei 2020
 Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Ibu/Os Jakarta
 Saetullah